



MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

Pornografi dan Pelayanan Publik

**Analisis Penerimaan Remaja
terhadap Wacana Pornografi
dalam Situs-situs Seks di Media Online**
Kandi Aryani

**Kondisi Menstruasi pada Remaja
yang Tinggal di Daerah Pemukiman Kumuh
Kota Surabaya**
M. Bagus Qomaruddin

**Presentasi Kekerasan dan Trauma Seksual
Analisis Isi Teks dalam Karya-karya**
Djenar Maesa Ayu
Ida Nurul Chasanah

**Konsep dan Nilai Kehidupan Masyarakat Tionghoa:
Analisis Wacana Ritual Tahun Baru Imlek**
Ni Wayan Sartini

**Politik Identitas Anak-anak
dalam Iklan Anak-anak**
Titik Puji Rahayu

**Resensi Buku
Pergulatan Pedagang Kakilima di Perkotaan
Pendekatan Kualitatif**
Herwanto, AM

MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

Diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, sebagai terbitan berkala tiga bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum belajar-mengajar yang lebih efektif

Pemimpin Umum

Hotman M. Siahaan

Wakil Pemimpin Umum

I. Basis Susilo

Penanggungjawab

Kris Nugroho

Dewan Redaksi

Soetandyo Wignjosoebroto (Unair)

Ramlan Surbakti (Unair)

Daniel Theodore Sparringa (Unair)

Mohtar Mas' oed (UGM)

Ashadi Siregar (UGM)

Herudjati Purwoko (Undip)

Edy Suhardono (Ubaya)

Pemimpin Redaksi

Doddy S. Singgih

Sekretaris Redaksi

Harijono

Redaksi Pelaksana

Bagong Suyanto

Yuyun Wahyu Izzati

Helmy Prasetyo

Produksi dan Pemasaran

Herwanto

STT No. 841/SK/Ditjen PPG/STT/1981

ISSN 0216-2407

Alamat Redaksi : FISIP Unair Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286, Indonesia

Telepon: 031-5034015, Fax: 031-5012442

e-mail : fisip@unair.ac.id

Pengantar Redaksi

Topik kajian atau tema utama jurnal *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* edisi kali ini menyetengahkan tentang Pornografi dan Pelayanan Publik. Pembicaraan tentang pornografi memang tidak ada habisnya, beragam pendapat dan sikap masyarakat dalam memandang pornografi penuh nuansa baik yang pro dan kontra. Apalagi DPR masih tarik ulur dalam mensahkan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi.

Bukan bermaksud untuk menjustifikasi dan mendukung yang pro dan kontra terhadap pornografi, akan tetapi yang terjadi pada masyarakat saat ini adalah semakin permisifnya sikap masyarakat terhadap hal-hal yang dulu dianggap tabu. Kehadiran media baik elektronik maupun cetak baik langsung maupun tidak langsung turut menyumbang sikap permisif masyarakat. Tidak dipungkiri juga peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan berbagai lembaga pengontrol moral turut menyuarakan penolakan terhadap pornografi.

Di sisi yang lain, pihak-pihak yang anti terhadap RUU APP adalah para pekerja seni dimana letak perbedaan porno dan seni sangat tipis sekali, masyarakat pemegang teguh adat setempat –seperti di Papua, serta suku-suku adat terasing di pedalaman. Memang yang diperlukan adalah menjaga moral dan batas-batas mana yang dianggap porno dan tidak supaya tidak menjadi tipis dan akhirnya hilang, yang pada akhirnya masyarakat tidak tahu mana yang boleh dan tidak di dalam menginterpretasikan pornografi.

Berbagai artikel yang terkumpul tidak lain adalah tanggapan dari permasalahan seputar pornografi dan pelayanan publik, selain terdapat berbagai tulisan di luar topik utama, antara lain: Analisis Penerimaan Remaja terhadap Wacana Pornografi dalam Situs-Situs Seks di Media Online oleh Kandi Aryani, Kondisi Menstruasi pada Remaja yang Tinggal di Daerah Pemukiman Kumuh Kota Surabaya oleh M. Bagus Qomaruddin, wacana dari sastra oleh Ida Nurul Chasanah yang mengupas tentang Presentasi Kekerasan dan Trauma Seksual: Analisis Isi Teks dalam Karya-Karya Djenar Maesa Ayu, di luar tema utama Konsep dan Nilai Kehidupan Masyarakat Tionghoa: Analisis Wacana Ritual Tahun Baru Imlek dipaparkan oleh Ni Wayan Sartini, Politik Identitas Anak-Anak dalam Iklan Anak-Anak oleh Titik Puji Rahayu, sedangkan resensi buku tentang Pergulatan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan: Pendekatan Kualitatif ditulis oleh Herwanto.

Redaksi berusaha menjaga keberadaan jurnal *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* dapat memberikan alternatif pemecahan masalah sekaligus menjadi media

Topik Utama Edisi No. 3 (Juli) 2006:
Media Massa, Demokratisasi dan Etika Sosial

interaksi yang dapat menjembatani para ahli yang intens terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, praktisi, ilmuwan sosial, pemerhati masalah sosial-politik dan berbagai pihak terkait dalam mengkomunikasikan gagasan serta ide demi kebaikan yang dapat terwujud dalam rangka menuju perubahan.

Redaksi

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

iii

Daftar Isi

v

Analisis Penerimaan Remaja terhadap Wacana Pornografi dalam Situs-situs Seks di Media Online

Kandi Aryani

1

Kondisi Menstruasi pada Remaja yang Tinggal di Daerah Pemukiman Kumuh Kota Surabaya

M. Bagus Qomaruddin

19

Presentasi Kekerasan dan Trauma Seksual: Analisis Isi Teks dalam Karya-karya Djenar Maesa Ayu

Ida Nurul Chasanah

29

Konsep dan Nilai Kehidupan Masyarakat Tionghoa: Analisis Wacana Ritual Tahun Baru Imlek

Ni Wayan Sartini

47

Politik Identitas Anak-anak dalam Iklan Anak-anak

Titik Puji Rahayu

63

Resensi Buku

Pergulatan Pedagang Kakilima di Perkotaan: Pendekatan Kualitatif

Herwanto, AM

83

Resensi Buku

PERGULATAN PEDAGANG KAKILIMA DI PERKOTAAN Pendekatan Kualitatif

Penulis : Dr. Yetty Sarjono, M.Si

Penerbit : Muhammadiyah University Press, Surakarta

Cetakan : Pertama, Agustus 2005

Tebal : xvii + 251 halaman

Peresensi : Herwanto, AM

Dosen Jurusan Sosiologi FISIP Unair, Surabaya

Buku yang berjudul Pergulatan Pedagang Kakilima di Perkotaan: Pendekatan Kualitatif ini merupakan disertasi Penulis. Penentuan tema buku ini didasari oleh fenomena riil yang telah terjadi, khususnya di kota Surakarta. Diantaranya seperti diungkapkan oleh penulis bahwa, *pertama*: banyaknya pedagang kakilima, dan toko swalayan besar atau mall di kota Surakarta menunjukkan perkembangan yang pesat, saat ini memiliki 36 pasar tradisional dan modern, dan sekurang kurangnya 8 toko swalayan besar, 7.126 los, 2.920 kios dan lebih dari 3.390 pedagang kakilima yang tersebar di berbagai sudut kota (hlm.1). Bertambahnya jumlah pedagang kakilima di pusat pusat kota yang memenuhi ruas jalan, sebagai dampak semakin banyaknya pengangguran, akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, ditambah lagi akibat pemutusan hubungan kerja dari perusahaan perusahaan serta

bertambahnya angkatan kerja baru yang tidak tertampung di sektor formal (hlm. 5). *Kedua*, realitas di lapangan menunjukkan bahwa seolah-olah terjadi "perebutan tempat strategis" di kota yang selama ini selalu dimenangkan toko swalayan, belakang ini ada kecenderungan "saling berbagi tempat" walau tidak sama, antara pengusaha toko swalayan dan pedagang kakilima, terlebih pasca kerusuhan Mei 1998. Hal ini dapat dilihat dari indikasi banyaknya pedagang kakilima yang masuk ke dalam area toko swalayan, baik yang ada di *emper* (luar) maupun yang ada di dalam toko swalayan. Masuknya pedagang kakilima ke dalam toko swalayan inilah yang kemudian dalam penelitian ini dinamakan formalisasi, karena atribut mereka sudah berubah bukan lagi sebagai pedagang kakilima, tetapi sudah formal karena dipenuhinya persyaratan persyaratan tertentu yang melabelkan mereka menjadi formal (hlm. 2).

Ketiga, terjadinya kerusuhan dan kekerasan massa di kota Surakarta, khususnya pada tanggal 14-16 Mei 1998, diiringi dengan terjadinya peristiwa pembakaran yang sangat hebat terhadap keberadaan toko swalayan, di luar ibu kota Jakarta. Dalam tinjauan sosiologis, kondisi demikian menunjukkan adanya resistensi para pelaku terhadap negara. Peristiwa semacam ini sebelumnya juga pernah terjadi di Surakarta yang salah satu sasarannya selalu mengarah pada simbol-simbol formal (took- toko besar maupun swalayan). Peristiwa sebelum itu diantaranya peristiwa Nopember 1966 tatkala terjadi pelemparan toko toko disekitar Coyudan. Kemudian juga peristiwa Nopember 1980 pembakaran took-toko dan swalayan serta rumah, khususnya milik Cina. *Keempat*, kenyataan formalisasi pedagang kakilima di kota ini, khususnya yang terjadi di took-toko swalayan dan berbagai tempat lain, masih menyisakan persoalan, seperti di Manahan, dengan pembuatan kios kios (formalisasi), tetapi tetap saja banyak pedagang kakilima yang masih beroperasi di sekitarnya. Munculnya pedagang kakilima yang baru tersebut sebagai akibat lunaknya kebijakan Walikota dalam penataan pedagang kakilima, khususnya lewat kantor pengelolaan pedagang kakilima. Hal ini terlihat jelas dari pernyataan pernyataan walikota yang sering mengatakan "tidak akan menggusur pedagang kakilima yang sudah ada" karena itu bagian dari *wong cilik*, kecuali di daerah yang harus steril dari pedagang kakilima, yaitu jalan Sudirman, jalan Slamet Riyadi yang dinyatakan sebagai jalan protokol. Sudah barang tentu penataan dan formalisasi yang dilakukan baik oleh pengusaha toko swalayan maupun oleh

pejabat pemerintah kota memiliki latar belakang dan tujuan yang berbeda, sesuai dengan keinginan mereka masing masing. Yang pasti bahwa terlalu seringnya terjadi kerusuhan massa dan pembakaran beberapa bangunan penting termasuk toko toko swalayan, kantor kantor, perbankan dan bahkan kantor Balai Kota, mencerminkan adanya resistensi yang harus diperhitungkan (hlm. 3).

Bedasarkan fenomena fenomena tersebut di atas, penulis kemudian memfokuskan perhatiannya pada permasalahan: Bagaimana pedagang kakilima, pengusaha toko swalayan dan pejabat pemerintah kota memahami formalisasi sektor informal, khususnya terhadap pedagang kakilima, dan bagaimana interrelasinya? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan metode kualitatif ini mementingkan makna, konteks, dan perspektif emik, proses penelitian yang berbentuk siklus dan proses pengumpulan data berlangsung secara simultan dan lebih mementingkan kedalaman daripada keleluasaan cakupan penelitian. Dengan demikian penelitian ini akan terfokus kepada dunia pemaknaan atau dunia konseptual terutama pedagang kakilima serta rasionalitas macam apa yang melatarbelakangi terjadinya formalisasi tersebut. Penggunaan pendekatan tersebut juga dimaksudkan agar dapat memahami realitas sosial sebagai realitas subyektif, memberikan tekanan terbuka tentang kehidupan sosial khususnya pedagang kakilima. Jadi yang dipandang penting dalam penelitian ini bukan soal jumlah/angka angka (*how much*), melainkan lebih kepada *what is* yang bersangkutan dengan formalisasi

pedagang kakilima. Disamping itu, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan fenomenologi, dalam pendekatan ini memandang perilaku manusia yang dikatakan dan dilakukan adalah sebagai produk bagaimana orang melakukan tafsir terhadap dunia mereka sendiri, dan untuk itu diperlukan apa yang disebut *verstehen* (Weber) dan fenomenologi Husserl (Collin, 1997) atau pemahaman empatik (merasa berada dalam diri orang lain), yang memerlukan kemampuan untuk memproduksi diri dalam pikiran orang, perasaan dan motif yang menjadi latar belakang kegiatannya (hlm. 51).

Sedangkan untuk memperoleh data, peneliti menggunakan teknik wawancara terhadap 17 informan yang terdiri dari para pedagang kakilima yang belum terformalisasi, pedagang kakilima yang sudah terformalisasi, pejabat pemkot surakarta dan tokoh masyarakat yang mengetahui persoalan formalisasi pedagang kakilima (hlm. 55 dan 57). Kemudian temuan utama yang dihasilkan oleh penulis diantaranya adalah: *pertama*, formalisasi dipahami oleh pejabat pemerintah kota sebagai beralihnya pedagang kakilima yang biasa berjualan dipinggir jalan yang mengesankan ketidak teraturan dan mengganggu ketertiban lalu lintas berubah menjadi pedagang semi permanen atau permanen yang tertib dan teratur. Disamping itu, formalisasi pedagang kakilima ini terus akan dilakukan untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) maupun untuk dapat menjalin kemitraan dan kesamaan pola pikir antara pedagang kakilima dengan pemerintah kota dalam proses pembangunan kota Surakarta. Mengenai makna formalisasi dari para pejabat kota, berdasarkan hasil analisis fenomenologi

dari Schutz, secara *because motives* atau motif sebab dinyatakan oleh penulis bahwa para pedagang kakilima selama ini dianggap (1) tidak tertib atau *semrawut*, (2) Retribusi yang kecil, (3) adanya kecemburuan sosial. Sedangkan secara *in order to motives* atau motif supaya disebutkan (1) supaya terjadi kondisi yang tertib, (2) diperoleh pajak yang lebih besar, (3) supaya terjadi keadilan sosial.

Kedua, formalisasi dimata pedagang kakilima, dimaknai sebagai peningkatan kesejahteraan dan keadilan. Artinya dengan formalisasi itu, pendapatan pedagang kakilima meningkat, dan adanya perlakuan serta hak seseorang yang sama untuk mendapat tempat berusaha. Disamping itu, formalisasi ini juga dimaknai sebagai salah satu cara untuk mengurangi kecemburuan sosial, karena selama ini mereka sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari pejabat pemerintah kota. Perlakuan dan kebijakan pemerintah kota selama ini memarginalkan mereka dan menguntungkan pemodal besar/kapitalis untuk mendapatkan tempat yang strategis. Namun demikian, selain itu, ditemukan juga oleh penulis, bahwa ada sebagian pedagang kakilima yang sampai saat ini menolak untuk diformalkan (dibuatkan kios), karena pertimbangan utamanya adalah lokasi yang jauh dari keramaian, jenis dagangan yang khas, tempat sekarang lebih menguntungkan karena retribusi yang kecil dan dapat menjual barang yang lebih murah daripada di toko yang harus kena pajak lebih besar (hlm. 220-221).

Mengenai formalisasi dimata para pengusaha toko swalayan, maka dari hasil analisis fenomenologi dari Schutz dikemukakan oleh penulis bahwa para pedagang kakilima itu mau diformalkan,

maka berdasarkan *because motives* atau motif sebab, karena (1) selama ini sering digusur gusur, (2) adanya desakan dari pemerintah kota, (3) adanya perlakuan diskriminatif, (4) terbatasnya pendapatan dan keuntungan. sedang secara *in order to motives* atau motif supaya adalah bahwa (1) mereka mendapatkan kepastian tempat yang permanen, (2) memenuhi keinginan pemerintah kota, (3) adanya perlakuan yang adil, (4) diperolehnya kesejahteraan dan peningkatan penghasilan (hlm. 223).

Ketiga, bagi para pengusaha toko swalayan, formalisasi dimaknai sebagai suatu kepentingan untuk merangkul para pedagang kakilima agar ikut mengamankan usahanya, disamping untuk menambah keuntungan. Disadari benar karena kota Surakarta (Solo) rentan terhadap terjadinya konflik dan kerusuhan, karenanya merangkul para pedagang kakilima di sekitar toko swalayan untuk masuk ke dalam menjadi alternatif terbaik. Faktor keamanan menjadi pertimbangan yang amat penting dalam usaha berdagang, dan menjadi suatu kebutuhan baru setelah relasi bisnis. Namun demikian, formalisasi ini ada persyaratannya yang harus dipenuhi oleh para pedagang kakilima, diantaranya (1) para pedagang tidak boleh menjual barang yang sudah disediakan oleh toko swalayan, (2) dagangan mereka harus merupakan dagangan yang sifatnya melengkapi dan dibutuhkan oleh konsumen, (3) setiap pedagang harus membayar uang sewa dengan cara membayar uang dimuka setiap bulannya, (4) ikut menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan.

Atas dasar analisis fenomenologi dari Schutz, dikemukakan oleh penulis bahwa *because motives* atau motif sebab,

dimana para pengusaha toko swalayan (1) merasa takut atau trauma terhadap peristiwa kekerasan dan pembakaran yang pernah terjadi, (2) kurang lengkapnya jenis dagangan dan tidak efisien, (3) kurang adanya daya tarik, (4) merespon kehendak pemerintah kota. Sedangkan secara *in order to motives* atau motif supaya yaitu, (1) diperolehnya rasa aman dalam berdagang, (2) Kelengkapan item barang dan lebih efisien, (3) adanya tambahan daya tarik, (4) supaya pemerintah kota lebih memperhatikan kepentingannya.

Keempat, menurut tokoh masyarakat, formalisasi pedagang kakilima itu pribumi yang lemah segalanya (lemah modal, lemah tempat usaha, lemah manajemen), karena itu membuat kios itu kewajiban pemerintah, dan memberdayakan mereka untuk ikut masuk ke toko swalayan adalah kewajiban pengusaha toko swalayan kalau ingin aman. Pedagang kakilima bukan saja menyangkut masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan budaya, oleh karena itu pemberdayaan pedagang kakilima itu diantaranya agar mereka itu tidak liar (hlm. 223-224).

Apabila dicermati, ada beberapa catatan terhadap buku ini. *Pertama*, dalam penelitian sosiologi yang menggunakan metode kualitatif, pada umumnya berusaha untuk menggali fenomena sosial tertentu secara mendalam, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih memadai dan realistik. Untuk itulah penulis dalam mengkaji fenomena formalisasi pedagang kakilima kali ini dapat dikatakan terlalu menyederhanakan konsep dari suatu fenomena. Hal ini nampak diabaikannya proses dan dinamika suatu fenomena formalisasi pedagang kakilima tersebut, sebagai gejala yang sangat kompleks,

seperti diantaranya apabila dilihat dari dimensi struktur, kultur maupun waktu. Dalam dunia ekonomi, pedagang kakilima itu merupakan suatu komunitas yang bersifat heterogen berada pada sirkuit bawah dan mempunyai karakteristik serba memiliki keterbatasan (seperti diantaranya keterbatasan modal, tempat usaha maupun kemampuan manajemen). Kenyataan demikian ini akan membentuk kultur mereka yang khas serba memiliki keterbatasan, diantaranya untuk mendapat modal bukan pinjam di bank tetapi di rentenir, tempat usaha tidak permanen dan seadanya, berpindah pindah tempat yang dianggap menguntungkan, pemberlakuan harga luncur (*slidding price*), tanpa manajemen dan/atau bila ada manajemen bersifat sederhana dan sangat lentur (elastis). Untuk itulah bila dilihat dari dimensi waktu, kultur demikian ini tidaklah akan begitu saja mudah berubah 180 derajat dalam tempo yang singkat dan dengan proses ataupun cara yang mudah.

Kedua, dalam suatu penelitian persoalan konsistensi sangatlah penting, baik kaitannya dengan substansi, metodologi maupun teknis penulisan. Sebagai suatu gambaran tentang judul buku ini, maka yang terpikir oleh para pembaca adalah bagaimana dinamika

pedagang kakilima di perkotaan itu berjuang untuk dapat tetap dapat eksis atau survive dalam menghadapi konsumen, sesama pedagang kakilima, pengusaha, petugas ketertiban dan para pembuat kebijakan, namun demikian yang muncul dalam permasalahan penelitiannya sekedar bagaimana pedagang kakilima, pengusaha toko swalayan, dan pejabat pemerintah kota memahami formalisasi terhadap pedagang kakilima, dan bagaimana interelasinya. Disamping itu, dalam permasalahan penelitian ini tercantum bagaimana pedagang kakilima, pengusaha toko swalayan dan pejabat pemerintah kota memahami formalisasi pedagang kakilima (hlm. 12), namun dalam pembahasannya muncul tokoh masyarakat, dan para konsumen.

Namun demikian, apapun interpretasi tentang isi buku ini yang pasti adalah bahwa buku ini telah memberikan sumbangan pikiran khususnya bagi para pejabat kota tentang bagaimana manajemen sektor informal itu diperlukan, khususnya pedagang kakilima agar keberadaannya dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak. Disamping itu, buku ini telah menambah referensi kajian sektor informal bagi para peneliti masalah masalah sosial perkotaan khususnya.

12. Redaksi berhak mengedit artikel agar mengahubungkan dengan pokok pikiran penulisan.
13. Redaksi tidak akan mengembalikan artikel yang telah tidak masuk.